

**PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL
TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI
PROVINSI DI INDONESIA**



SKRIPSI

**Diajukan untuk
memenuhi sebagian syarat untuk memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi**

**Oleh:
Michael
2016110018**

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM SARJANA EKONOMI PEMBANGUNAN
Terakreditasi Berdasarkan Keputusan BAN-PT No. 1759/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2018
BANDUNG
2021**

**THE IMPACT OF FISCAL DECENTRALIZATION
ON ECONOMIC GROWTH OF PROVINCES
IN INDONESIA**



UNDERGRADUATE THESIS

Submitted to complete part of the requirements for
Bachelor Degree in Economics

By
Michael
2016110018

PARAHYANGAN CATHOLIC UNIVERSITY
FACULTY OF ECONOMICS
PROGRAM IN DEVELOPMENT ECONOMICS
Accredited by National Accreditation Agency No. 1759/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2018
BANDUNG
2021

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM SARJANA EKONOMI PEMBANGUNAN



PERSETUJUAN SKRIPSI

**Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan
Ekonomi Provinsi di Indonesia**

Oleh:

Michael

2016110018

Bandung, Juli 2021

Ketua Program Studi Sarjana Ekonomi Pembangunan,

Ivantia S. Mokoginta, Ph.D

Pembimbing,

Ivantia S. Mokoginta, Ph.D

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini,

Nama : Michael
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 10 Agustus 1998
NPM : 2016110018
Program Studi : Sarjana Ekonomi Pembangunan
Jenis naskah : Skripsi

JUDUL

Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia
Pembimbing : Ivantia S. Mokoginta, Ph. D

MENYATAKAN

Adalah benar-benar karya tulis saya sendiri:

1. Apapun yang tertuang sebagai bagian atau seluruh isi karya tulis saya tersebut di atas dan merupakan karya orang lain (termasuk tapi tidak terbatas pada buku, makalah, surat kabar, internet, materi perkuliahan, karya tulis mahasiswa lain), telah dengan selayaknya saya kutip, sadur atau tafsir dan jelas telah saya ungkap dan tandai
2. Bahwa tindakan melanggar hak cipta dan yang disebut plagiat (*plagiarism*) merupakan pelanggaran akademik yang sanksinya dapat merupakan peniadaan pengakuan atas karya ilmiah dan kehilangan hak keserjanaan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan oleh pihak manapun.

Pasal 25 Ayat (2) UU.No.20 Tahun 2003:
Lulusan perguruan tinggi yang karya ilmiahnya digunakan untuk memperoleh gelar akademik, profesi, atau vokasi terbukti merupakan jiplakan, dicabut gelarnya.
Pasal 70: Lulusan yang karya ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan gelar akademik, profesi, atau vokasi sebagai mana dimaksud dalam Pasal 25 Ayat (2) terbukti merupakan jiplakan dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 200 juta.

Bandung,
Dinyatakan tanggal :22 Juli
2021
Pembuat pernyataan :



(Michael)

ABSTRAK

Desentralisasi fiskal pada dasarnya memiliki tujuan untuk meningkatkan kemandirian daerah. Tujuan dari penelitian ini adalah mengidentifikasi tingkat kemandirian daerah dan bagaimana tingkat kemandirian daerah dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel dari 33 provinsi di Indonesia pada tahun 2011-2019. Hasil dari penelitian ini adalah (1) secara umum tingkat kemandirian daerah masih dalam kategori rendah dan sangat rendah. (2) secara keseluruhan tingkat kemandirian daerah tidak signifikan dan memiliki pengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. (3) secara keseluruhan variabel investasi signifikan secara statistik berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. (4) Variabel *Human capital* dan tenaga kerja tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Kata Kunci: Desentralisasi Fiskal, Efisiensi Anggaran, Pertumbuhan Ekonomi.

ABSTRACT

Fiscal decentralization basically has the aim of increasing regional independence. The purpose of this study is to identify the level of regional independence and how regional independence can encourage economic growth. The data used in this study is panel data from 33 provinces in Indonesia in 2011-2019. The results of this study are (1) in general the regional independence is still in the low and very low category. (2) overall regional independence is not significant and has a negative effect on economic growth. (3) overall investment variables have a statistically significant positive effect on economic growth. (4) Human capital and labor variables are not significant effect on economic growth.

Keywords: Fiscal Decentralization, Budget Efficiency, Economic Growth.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas berkah dan anugerah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Universitas Katolik Parahyangan Bandung. Dengan segala upaya, usaha, serta kemampuan, penulis berusaha menyusun skripsi ini agar dapat berguna bagi semua pihak.

Dalam penyusunan dan penulisan skripsi, banyak rintangan yang penulis hadapi namun pada akhirnya dapat dilalui berkat dukungan, saran, dan doa, serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Keluarga tercinta, ayahanda tercinta Tan Tek Seng dan Ibunda tersayang Christine selaku kedua orang tua penulis yang selalu memberikan kasih sayang, doa, dorongan, perhatian, dan pengorbanan baik secara moril maupun materil kepada penulis. Terima kasih juga kepada Jonathan dan Nathalie selaku adik penulis yang selalu memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsinya.
2. Ibu Ivantia S. Mokoginta, Ph.D. selaku dosen pembimbing, dosen wali, dan Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan yang selalu dengan sabar memberikan banyak ilmu, masukan, arahan, waktu, pikiran, tenaga, dan perhatian sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Ibu Dr. Miryam B. L. Wijaya dan Bapak Chandra Utama, S.E., M.M., M.Sc selaku dosen bidang kajian EMK yang telah memberikan banyak pengetahuan, motivasi, pengalaman dan pembelajaran yang berharga selama masa perkuliahan
4. Seluruh dosen dan tutor Program Studi Ekonomi Pembangunan lainnya yang telah membagikan banyak ilmu kepada penulis. Semoga semua ilmu yang telah penulis peroleh dapat bermanfaat bagi kehidupan penulis di masa yang akan datang.
5. Nadia, Nia, Ferensky, Ferinda, Ita, terima kasih telah memberikan semangat, berbagi pengalaman, dan membantu penulis saat mengalami kesulitan dalam menyusun skripsi ini.
6. Para sahabat-sahabat penulis yang menemani saat kuliah: Josep, Algi, Rama, Fachmi, Rio, Aseng, Dea, Raihan, Ganang, Tsabit dan lain-lain terima kasih banyak atas kebersamaan, pengalaman, canda dan tawa
7. Para sahabat penulis: Felicia Febriani, Calvin Chriswandi, Felicia Ebelin, Alfred, Iola, Floren, Ceka, Diki, Toto, Cristian, Hubert dan lain-lain terima kasih banyak atas kebersamaan, pengalaman, canda dan tawa
8. Keluarga Ekonomi Pembangunan Unpar 2016, terutama teman teman seperjuangan bidang kajian yaitu Garry, Bene, Calvin. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang ikut memberikan segala bantuan kepada penulis selama ini dalam menyelesaikan skripsi ini

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	4
1.4 Kerangka Pikir.....	4
2 TINJAUAN PUSTAKA.....	6
2.1 Desentralisasi Fiskal.....	6
2.2 Pertumbuhan Ekonomi	9
2.3 Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi.....	12
3 METODE DAN OBJEK PENELITIAN.....	15
3.1 Metode Penelitian.....	15
3.1.1 Jenis dan Sumber Data.....	15
3.1.2 Teknik Analisis	16
3.2 Objek Penelitian	21
3.2.1 Penghasilan Asli Daerah (PAD)	21
3.2.2 Total Pendapatan Daerah (TPD).....	23
3.2.3 Investasi	24
3.2.4 Tenaga Kerja.....	25
3.2.5 Human Capital	26
4 Hasil Dan Pembahasan.....	28
4.1 Hasil Analisis Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF).....	28
4.2 Hasil Regresi Data Panel	30
4.2.1 Pemilihan Model.....	30
4.2.2 Uji Asumsi Klasik.....	32
4.2.2.1 Uji Multikolinearitas.....	32
4.2.2.2 Uji Heteroskedastisitas	33
4.2.2.3 Hasil dan Estimasi Random Effect Model (REM)	33
4.3 Pembahasan	35
5 Penutup.....	37

5.1 Kesimpulan.....	37
5.2 Saran.....	38
Daftar Pustaka	39
Lampiran	43
Riwayat Hidup Penulis.....	47

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Indikator Variabel	15
Tabel 2. Rata-rata DDF di Indonesia Tahun 2011-2019.....	28
Tabel 3. Uji Redundant Fixed Effect	30
Tabel 4. Uji Hausman	31
Tabel 5. Uji Lagrange Multiplier	31
Tabel 6. Hasil Uji Multikolinearitas	32
Tabel 7. Hasil Uji Heteroskedastisitas	33
Tabel 8. Hasil Regresi	34

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Perkembangan Dana Perimbangan Tahun 2001-2008	2
Grafik 2. Pendapatan Asli Daerah Pada Tahun 2011-2017	22
Grafik 3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Pulau Tahun 2012-2017	23
Grafik 4. Total Pendapatan Daerah Tahun 2011-2019	24
Grafik 5. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) Tahun 2011-2019 di Indonesia	25
Grafik 6. Tenaga Kerja Tahun 2011-2019 di Indonesia	26
Grafik 7. Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2011-2019.....	27

1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada saat ini hubungan yang dimiliki oleh pemerintah pusat dan daerah telah berkembang, perkembangan ini dikarenakan adanya desentralisasi. Desentralisasi pada umumnya dapat diartikan sebagai pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, desentralisasi sendiri dimulai pada tahun 1990an. Dalam melimpahkan wewenangnya, desentralisasi dibagi menjadi tiga bidang yaitu fiskal, administrasi, dan politik. Oates (1999) mengatakan bahwa lebih baik jika beberapa tugas diberikan kepada pemerintah daerah, agar pengembangan yang dilakukan daerah sesuai dengan yang dibutuhkan masyarakat.

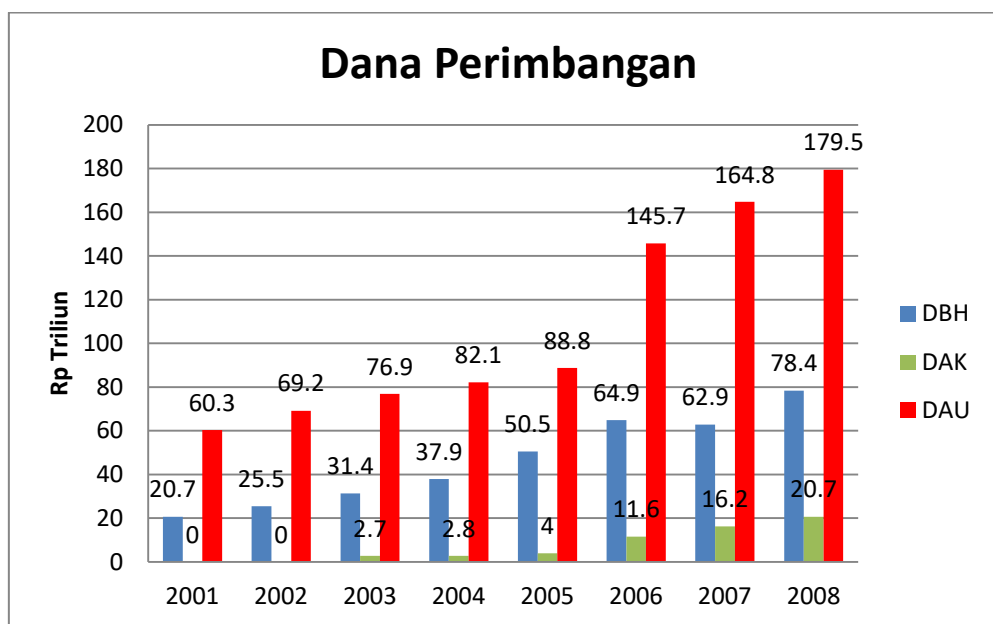
Desentralisasi fiskal merupakan pemberian wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam hal mengelola anggaran daerahnya sendiri, seperti mampu untuk mengambil keputusan dalam belanja. Desentralisasi fiskal di Indonesia telah diberlakukan mulai tahun 2001 dan sampai saat ini peraturan yang mengatur desentralisasi fiskal sudah banyak mengalami perubahan. Perkembangan yang terjadi pada desentralisasi fiskal dapat dilihat dari adanya rancangan APBN pada tahun 2016, yang semula bernilai sebesar 770,2 triliun meningkat menjadi 776,3 triliun. Dana tersebut lebih besar dari dana yang diberikan kepada kementerian yang hanya memiliki dana 767,8 triliun. Hal ini menunjukkan bahwa dana yang diberikan untuk pembangunan daerah menjadi sangat penting untuk diperhatikan.

Pada pelaksanaan desentralisasi fiskal yang ada di Indonesia pendanaan yang didapatkan daerah dibagi menjadi tiga, yaitu: dana perimbangan, PAD (Pendapatan Asli Daerah), dan pendapatan sah lain-lainnya. Pemberian dana transfer yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah diharapkan akan mendorong terciptanya kesempatan kerja, mengatasi kemiskinan dan meningkatkan barang dan layanan publik. Dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal, setiap daerah memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Perbedaan itu memiliki beberapa aspek yang mempengaruhinya seperti kelembagaan, jumlah penduduk, dan kapasitas fiskal. Perbedaan tersebut yang membuat pertumbuhan yang terjadi pada setiap daerah berbeda satu dengan yang lainnya, sehingga untuk meningkatkan pertumbuhan daerah diperlukannya efisien dalam hal pengelolaan keuangan. Dana perimbangan

merupakan pendapatan yang paling besar didapatkan oleh pemerintah daerah. Dana perimbangan itu sendiri dibagi menjadi 3 bagian (DAU, DBH, DAK), setiap bagian memiliki kegunaan yang berbeda-beda. Perbedaan itu diharapkan dapat membantu daerah dalam mengelola keuangan.

Sejak diberlakukannya desentralisasi fiskal pada tahun 2001, pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia telah meningkat pesat. Peningkatan tersebut dapat dilihat dari kenaikan jumlah pada dana perimbangan yang diberikan kepada daerah setiap tahunnya. Berikut besaran dana transfer kepada daerah pada grafik berikut;

Grafik 1. Perkembangan Dana Perimbangan Tahun 2001-2008



Sumber : Depkeu, NKRAPBN 2009 dan RAPBN 2010

Berdasarkan grafik di atas dapat dilihat perkembangan dana perimbangan yang ditransfer kepada daerah selalu meningkat, terutama dari DAU. Peningkatan DAU sangat signifikan pada tahun 2006 meningkat sampai 145.7 triliun rupiah, jika dilihat pada awal diberlakukannya desentralisasi fiskal pada 2001 DAU hanya memberikan dana sebesar 60.3 triliun rupiah. Selain DAU yang meningkat, DBH mengalami peningkatan secara konsisten. Peningkatan yang terjadi pada DBH mencapai 78.4 triliun rupiah. DAK yang diberikan pemerintah pusat kepada daerah mengalami peningkatan. DAK yang mulai diberlakukan pada tahun 2003, pada awalnya hanya diberikan dana 2.7 triliun rupiah dan meningkat sampai 20.7 triliun rupiah pada tahun 2008. Peningkatan dana perimbangan diiringi oleh meningkatnya jumlah daerah sehingga kebutuhan atas pendanaan daerah meningkat, peningkatan

pendanaan daerah sama dengan meningkatnya dana perimbangan (Bappenas, 2007).

Pemberian dana kepada daerah-daerah dalam bentuk dana perimbangan, pada pelaksanaannya belum bisa mendorong pertumbuhan ekonomi daerah-daerah. Hal ini masih menjadi perdebatan karena perbedaan dari beberapa hasil penelitian. Penelitian Davoodi dan Zou (1998) menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi pada negara-negara berkembang. Zhang dan Zou (1998) menunjukkan bahwa desentralisasi memiliki pengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Untuk penelitian Malik et al (2006) menunjukkan bahwa desentralisasi berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Miri *et al* (2017), meneliti hubungan antara desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi di maroko pada tahun 2003-2014. Pada penelitian ini ditemukan bahwa pengaruh jangka pendek dan jangka panjang memiliki perbedaan, pada jangka panjang memiliki hasil signifikan positif sedangkan untuk jangka pendek signifikan negatif. Adanya perdebatan yang terjadi tersebut membuat peran desentralisasi fiskal masih dipertanyakan hingga saat ini.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, pemberlakuan desentralisasi fiskal tidak selalu mendorong pertumbuhan secara signifikan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Woller dan Philips (1998) disimpulkan bahwa desentralisasi fiskal tidak mempunyai dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi pada negara yang sedang berkembang. Sedangkan Oates (1993) mengatakan bahwa adanya desentralisasi fiskal dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, karena pemerintah daerah dapat mendorong peningkatan produksi dan pengadaan barang publik. Di Indonesia sendiri masih belum diketahui apakah dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, karena masih banyak daerah-daerah di Indonesia masih menjalankan daerah dengan menggunakan dana transfer dari pemerintah pusat. Transfer yang diberikan pusat kepada daerah merupakan instrumen yang digunakan dalam kebijakan desentralisasi fiskal. Salah satu peran dari desentralisasi fiskal adalah menciptakan kemandirian daerah, dengan melihat kemandirian daerah dapat dilihat apakah kebijakan desentralisasi fiskal berjalan dengan lancar atau tidak. Pada kenyataannya pemberian dana transfer tersebut masih belum teridentifikasi apakah dapat menciptakan kemandirian daerah tercapai atau

tidak, dan pengaruhnya kepada pertumbuhan ekonomi yang ada di Indonesia. Penelitian ini berfokus untuk menganalisa kemandirian daerah dan melihat apakah kemandirian daerah dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.

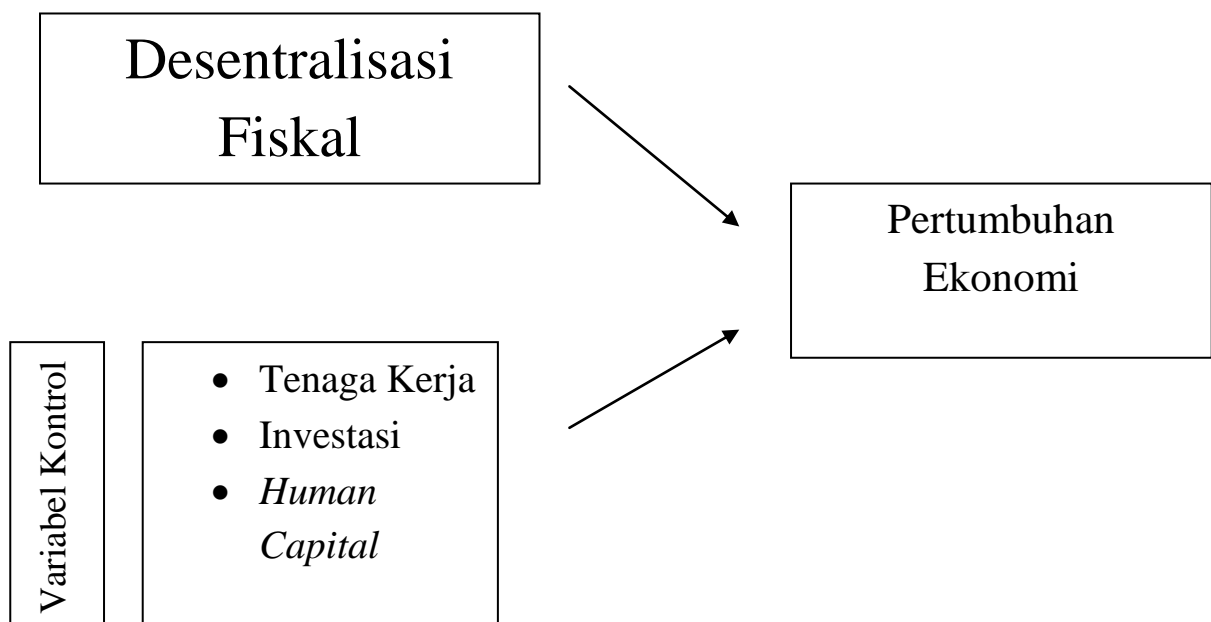
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang, dengan adanya desentralisasi fiskal yang belum secara signifikan mendorong pertumbuhan ekonomi, dengan adanya masalah tersebut maka berikut tujuan penelitian yang diajukan sebagai berikut;

1. Mengidentifikasi besaran kemampuan keuangan setiap provinsi
2. mengidentifikasi pengaruh kemampuan keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Hasil temuan ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi para petinggi dalam menjalankan kebijakan desentralisasi fiskal. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi bagi peneliti lain yang ingin memperdalam pengertian tentang bagaimana hubungan desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi.

1.4 Kerangka Pikir



Pada tahun 2001 yang merupakan awal diberlakukannya desentralisasi fiskal, diberlakukan juga transfer ke daerah dalam bentuk dana perimbangan. Dana perimbangan tersebut dibagi menjadi 3 berdasarkan UU no. 33 tahun 2004, yaitu:

Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil. Pembagian yang terdapat dalam UU diharapkan dapat mengatasi ketimpangan horizontal (*Horizontal imbalances*) dan ketimpangan vertikal (*Vertical imbalances*). Untuk mengatasi ketimpangan horizontal (*Horizontal imbalances*) maka pemerintah menggunakan DAK dan DAU sedangkan untuk mengatasi ketimpangan vertikal (*Vertical imbalances*) menggunakan DBH. Selain dana perimbangan, daerah memiliki sumber pendanaan lain yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pendapatan lainnya yang sah. Dengan keunggulan informasi yang dimiliki oleh pemerintah daerah, akan membuat pendanaan atau transfer yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah dapat dimanfaatkan dengan baik. Penggunaan dana yang baik dapat dilihat melalui peningkatan layanan publik dan barang publik yang disediakan oleh pemerintah daerah (terciptanya efisiensi). Transfer yang diberikan pusat kepada daerah merupakan instrumen yang digunakan dalam kebijakan desentralisasi fiskal. Salah satu peran dari desentralisasi fiskal adalah menciptakan kemandirian daerah, dengan melihat kemandirian daerah dapat dilihat apakah kebijakan desentralisasi fiskal berjalan dengan lancar atau tidak. Kemandirian daerah sendiri tercipta dikarenakan adanya pengalokasian dana yang dilakukan pemerintah daerah juga berpengaruh penting dalam mendorong efisiensi, pengertian efisiensi adalah pengalokasian dana yang ada dilakukan dengan tepat sasaran. Pengalokasian dana yang tepat sasaran ini diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Teori pertumbuhan yang dikemukakan oleh Solow mengatakan bahwa suatu produksi output dipengaruhi oleh modal, tenaga kerja dan teknologi. Peran teknologi yang ada pada teori Solow, sesungguhnya menjadi faktor yang penting. Pada penelitian ini variabel tersebut diganti dalam bentuk *human capital*, dimasukkannya *human capital* dikarenakan belum ada tolak ukur yang pasti untuk kemajuan teknologi. Penggunaan *human capital* secara tidak langsung dapat menunjukkan seberapa baik kualitas sumber daya daerah dan peningkatan yang terjadi pada sumber daya manusia dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi selanjutnya teknologi, penggunaan variabel *human capital* didukung oleh penelitian Miri *et al* (2017).